

**KOORDINASI INTERNAL PEMERINTAH DAERAH  
DALAM MELAKSANAKAN INOVASI PROGRAM PEMERINTAH  
UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 19  
DI KOTA MAKASSAR**

M. Rifqi Hidayatullah

Npp 29.1390

*Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: rifqihidayatullah123@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The author focuses on problems related to the Coordination of Local Governments in the Implementation of the Coronavirus Disease 19 Spread Prevention Program in Makassar City. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the internal coordination of local governments in implementing government program innovations to prevent the spread of Coronavirus Disease 19 in Makassar City, knowing the innovations of local governments in the implementation of Mayor Regulation Number 5 of 2021 in preventing the spread of Coronavirus Disease 19 in order to reduce the number of positive patients in Makassar City, and also describe and analyze the obstacles and efforts that are by local government in carrying out programs to prevent the spread of Coronavirus Disease 19 in Makassar City. **Method:** This research is a qualitative research with a descriptive method and an inductive approach using Handyningrat theory as a theoretical basis. Data collection is carried out by interviews and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Findings** The findings obtained by the researcher, namely the coordination that has been carried out by related parties in the success of government programs, can be said to be very good because the four dimensions contained in the Coordination theory proposed by handyningrat researchers' value has been maximized. **Conclusion** : Internal coordination carried out by the Makassar City government is carried out externally and internally, so that the expected results are optimally successful, starting from two-way communication carried out by related parties to a good picture of the continuity of regulation and still following the direction of the authorized officials as stated in the form of a legal product. innovations carried out by the Makassar City government are very effective and efficient in reducing the covid 19 rate in Makassar City and can be used as a pilot for other regions that have a very high covid 19 rate.

**Keywords:** *Coordination, Covid 19, Local Government*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan terkait Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 19 di Kota Makassar. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana koordinasi internal pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi program pemerintah untuk pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 19 di Kota Makassar, mengetahui inovasi pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 dalam pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 19 dalam rangka mengurangi jumlah pasien positif di Kota Makassar, dan juga mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dan upaya yang oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 19 di Kota Makassar. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori Handyaningrat sebagai landasan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam mensukseskan program pemerintah dapat dikatakan sangat baik karena keempat dimensi yang terdapat dalam teori Koordinasi yang dikemukakan oleh Handyaningrat peneliti nilai sudah maksimal. **Kesimpulan:** Koordinasi internal yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dilakukan secara eksternal maupun internal, sehingga hasil yang diharapkan berhasil secara maksimal mulai dari komunikasi dua arah yang dilakukan pihak-pihak terkait hingga gambaran kontinuitas perencanaan yang baik dan tetap mengikuti arahan dari pejabat berwenang yang dituangkan dalam bentuk suatu produk hukum. Inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar sangat efektif dan efisien dalam mengurangi angka covid 19 di Kota Makassar dan dapat dijadikan percontohan bagi daerah lain yang memiliki angka covid 19 yang sangat tinggi.

**Kata Kunci :** Koordinasi, Covid 19, Pemerintah Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seluruh penjuru dunia pada masa kini sedang mengalami sebuah wabah pandemi yang memberikan dampak besar dalam proses kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) menetapkan Coronavirus Disease 19 atau Covid 19 sebagai pandemi. Pandemi ialah sebuah wabah yang menyebar hampir keseluruhan belahan dunia meliputi daerah geografi yang kecil maupun luas.

Bulan April 2020, Covid 19 dinobatkan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Bencana yang dikategorikan non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (BNPB, 2007)

Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, berdasarkan laporan dari Satgas Covid-19 per tanggal 31 Agustus 2021, Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam 10 besar nasional penyebaran covid-19. Zona merah adalah sistem zonasi yang diberlakukan pada suatu daerah karena kasus covid-19 di daerah tersebut sedang tinggi (Satgas Covid, 2020). Salah satu faktor penyebabnya karena letak Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur baik melalui jalur udara maupun laut.

Masalah Pandemi yang terjadi di Kota Makassar belum tuntas sehingga perlu koordinasi pemerintah yang lebih baik lagi dalam mengatasi terkait covid tersebut. Dalam penanganan pandemi di Kota Makassar, pemerintah daerah telah melakukan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Menurut Handoko (dalam Afendi, dkk, 2019) jika ada pembagian kerja maka diperlukan pengkoordinasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan. Koordinasi internal Pemerintah daerah Kota Makassar harus dijalankan dengan baik dalam menjalankan peraturan tersebut.

Dalam lingkup pemerintahan, koordinasi berkaitan dengan pengaturan terhadap setiap kegiatan dan hubungan kerja yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencegah terjadinya pemborosan akibat saling klaim tugas dan tanggung jawab oleh unsur pemerintah (Nurhidayat, dkk., 2013:155). Koordinasi bukan tentang politik dan administrasi sederhana, namun berbagai macam masalah pada sektor publik, dan tentu diperlukan kerjasama mungkin timbul karena berbagai alasan dalam administrasi dan politik. Koordinasi internal pemerintah daerah dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat vital, karena salah satu elemen berhasilnya suatu program dipengaruhi oleh pola koordinasi yang terstruktur.

Masalah dalam koordinasi merupakan salah satu masalah terpenting yang sering terjadi di pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan koordinasi menjadi faktor utama kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Febrian, 2015:41)

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Koordinasi dibutuhkan dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Makassar karena dalam proses pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dalam lingkup pemerintah daerah Kota Makassar. Koordinasi bertujuan untuk menyinkronkan kegiatan agar terjadi keserasian terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Pada pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah Kota Makassar dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid 19 diperlukan koordinasi yang baik agar dapat mencegah tumpang tindih akan tugas pemerintahan dalam pelayanan masyarakat serta dapat memanfaatkan dana atau anggaran yang telah di alokasikan secara efektif dan efisien.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada empat penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu Penelitian Shita Listya Dewi dan Hermawati Setyaningsih berjudul Peran Sektor Swasta dalam Respon Terhadap Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Kualitatif Deskriptif menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Dalam kerjasama yang dilakukan dengan sektor swasta, dari sisi perspektif pemerintah, pemerintah melakukan kerjasama melalui menerbitkan peraturan-peraturan, seperti penunjukan beberapa rumah sakit swasta sebagai RS rujukan, peraturan terkait klaim pembiayaan, serta SK penunjukkan gugus tugas penanganan Covid-19 yang mengajak pihak-pihak diluar pemerintah seperti akademisi dan lainnya. Sedangkan dari sisi rumah sakit swasta maupun lainnya, sifatnya lebih responsif. Lalu untuk Kelompok masyarakat sifatnya lebih mandiri, hanya berhubungan dengan pemerintah bila dirasa perlu, misalnya mencari data masyarakat yang masih perlu dibantu. Hal ini tentu saja menjadi masukan untuk kedepannya agar tercipta model yang lebih efektif terkait kerja sama pemerintah dengan swasta. Untuk kelompok masyarakat, kapasitas sangat didukung oleh donasi masyarakat dan peran dari filantropi. Kelompok-kelompok tersebut melakukan self funding dan punya kapasitas yang cukup untuk melakukan kegiatan yang diinisiasikan, bahkan membuat inovasi-inovasi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini..

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Syaidah berjudul Inovasi layanan public pusat informasi dan koordinasi di Jawa Barat (PIKOBAR) saat pandemic covid 19. Penelitian ini merupakan Kualitatif Deskriptif menggunakan metode studi literature. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti tersebut mendapatkan hasil bahwa Masih kurangnya koordinasi antar institusi dalam pelaksanaan pelayanan publik menyebabkan pelayanan dimasa pandemic covid-19 tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Penelitian dilakukan oleh Andi Tenri Rezki Oji, Samsu Alam, dan Siti Patimah. berjudul Evaluasi kebijakan perwali no.20 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar di kota Makassar. Penelitian ini merupakan Kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Adanya kebijakan perwali no.22 tahun 2020 di kota Makassar tetap menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan, disatu sisi banyak kalangan yang menyatakan sikap untuk mendorong penerapan PSBB dimana hal tersebut dapat memutus mata rantai penularan dari Covid-19.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Christian Leonard Parit berjudul Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Koordinasi yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan tanggungjawab yang diemban masing-masing lembaga. Dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah FORKOPIMCAM kecamatan Kalawat saling berkoordinasi satu sama lain. Usaha Kerjasama yang dilakukan selama ini dalam rangka koordinasi pencegahan penyebaran virus corona

dapat disimpulkan bahwa berbagai usaha yang dilakukan bersama-sama antara FORKOPIMCAM Kalawat dalam rangka penanganan penyebaran virus corona antara lain dengan mengadakan rapat koordinasi dengan membahas peraturan dan kebijakan baik nasional dan daerah terutama dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di daerah selanjutnya pelaksanaan bersama-sama program kerja serta langkah strategi yang telah dilakukan bersama-sama. Dari aspek kesatuan tindakan yang dilaksanakan oleh FORKOPIMCAM Kalawat, dapat disimpulkan telah ada kesatuan tindakan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan kebijakan baik yang bersifat nasional maupun internal.

#### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian Shita Listya Dewi dan Hermawati Setyaningsih; Syaidah; Penelitian Andi Tenri Rezki Oji, Penelitian Samsu Alam, dan Siti Patimah; dan juga Penelitian Christian Leonard Parit. Disamping perbedaan lokus penelitian juga memiliki perbedaan dalam metode atau teori yang digunakan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis koordinasi internal pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi program pemerintah untuk pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 19 di Kota Makassar, untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 dalam pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 19 dalam rangka mengurangi jumlah pasien positif di Kota Makassar, dan juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dan upaya yang oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 19 di Kota Makassar.

## **II. METODE**

Lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Politik Indonesia Terapan. Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada lima indikator koordinasi yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen, dan Intensif, dan Kontinuitas Perencanaan sesuai yang dikemukakan oleh Handyagrati (1989). Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan verifikasi dari keseluruhan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sembilan orang informan yang terdiri dari tiga informan kunci dan enam informan pendukung. Informan kunci yang dimaksud yaitu pertama Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar; kedua Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar; ketiga Penanggungjawab pelayanan isolasi apung; keempat Petugas pelayanan posko isolasi apung. Selain informan kunci dalam penelitian ini terdapat informan pendukung yaitu Masyarakat

yang pernah melakukan isolasi apung dan . Masyarakat yang belum melakukan isolasi apung

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa dokumentasi dan wawancara, hasil yang penulis dapatkan berdasarkan lima indikator koordinasi yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan Komitmen, dan Intensif, dan Kontinuitas Perencanaan sesuai yang dikemukakan oleh Handyani (1989), yaitu :

#### **3.1 Komunikasi**

melakukan komunikasi yang baik dan efektif sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjalankan kebijakan pemerintah Kota Makassar dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Dalam hal ini, kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah terkait protokol kesehatan dalam pengamatan penulis, masih banyak masyarakat yang belum secara sadar menjalankan kebijakan tersebut. Maka bentuk pola komunikasi dalam hal ini koordinasi sangat berperan penting dalam mensosialisaikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hasil yang diharapkan. Secara analisa komunikasi, sangatlah penting dalam antar pemerintah daerah Kota Makassar demi tercapainya tujuan bersama dan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Makassar itu sendiri..

#### **3.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi**

Koordinasi merupakan salah satu dari fungsi dalam manajemen yang memegang peranan penting yang harus berjalan dengan fungsi fungsi manajemen lainnya. Pada dasarnya, pihak yang terlibat pada suatu koordinasi harus memiliki persepsi yang sama akan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, walaupun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Namun koordinasi yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut merupakan suatu rangkaian dalam rangka saling membantu dan melengkapi agar dapat mencapai suatu tujuan bersama. Pola koordinasi yang efektif memiliki beberapa indikator penting yang menjadi acuan dalam mencapai tujuan tersebut.

#### **3.3 Kompetensi Partisipan**

Pada dasarnya, pihak yang terlibat pada suatu koordinasi harus memiliki persepsi yang sama akan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, walaupun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Namun koordinasi yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut merupakan suatu rangkaian dalam rangka saling membantu dan melengkapi agar dapat mencapai suatu tujuan bersama. Pola koordinasi yang efektif

memiliki beberapa indikator penting yang menjadi acuan dalam mencapai tujuan tersebut.

#### **3.4 Kesepakatan, Komitmen, dan Intensif**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan itu perlu ada kebijakan atau dasar hukum yang mengatur, agar jelas dan terarah sehingga output dan outcome yang dihasilkan jelas dan sesuai yang diharapkan. Contohnya saja kegiatan isolasi apung ini, pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Makassar membuat Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 terkait Makassar Recovery itu mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk ikut serta dalam mencegah penyebaran covid 19 ini di Kota Makassar. Namun, lebih khusus bagi beberapa instansi diberikan tugas tambahan, misalnya Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan yang ditugaskan dalam pelaksanaan isolasi apung. Dari sini kami pihak Dinas Perhubungan terlebih dahulu melakukan rapat secara internal untuk memetakan bidang apa saja yang memiliki peran vital berdasarkan Perwali tersebut, dan bidang bidang yang lain membantu untuk back up. Adapun bidang yang memiliki peran penting dalam kegiatan isolasi apung ini adalah dari bidang Transportasi sebagai penyedia Kapal yang akan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan isolasi apung, serta pejabat Dinas Perhubungan sendiri yang akan memantau dan mengevaluasi kesediaan dari Kapal tersebut yang nantinya akan dilaporkan secara bertahap kepemimpinan tertinggi dan koordinasi lebih mendalam dengan Dinas Kesehatan

#### **3.5 Kontinuitas Perencanaan**

penyelenggaraan pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Makassar yakni mengikuti kebijakan dari pemerintah yang dapat dikatakan dinamis. Sehingga untuk kepastian berlanjut tidaknya kegiatan tersebut itu sesuai dengan kebijakan yang ada. Seluruh pihak berharap kedepannya kerja sama dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Makassar dapat lebih baik lagi untuk dapat mengurangi penyebaran covid-19 di Kota Makassar.

#### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak pihak terkait dalam mensukseskan program pemerintah dapat dikatakan sangat baik karena kelima dimensi yang terdapat dalam teori Koordinasi yang dikemukakan oleh Handyadiningrat peneliti nilai sudah maksimal.

komunikasi pemerintah daerah Kota Makassar cukup baik. Selain itu pemerintah Kota Makassar juga ikut membangun ikatan emosional dengan masyarakat dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat yang digelar pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan komunikasi yang baik.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi internal yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dilakukan secara eksternal maupun internal, sehingga hasil yang diharapkan berhasil secara maksimal. Adapun koordinasi yang dianalisa oleh peneliti yaitu koordinasi internal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini adalah koordinasi perangkat daerah Kota Makassar dalam hal pencegahan penyebaran covid 19 di Kota Makassar. Berdasarkan program isolasi apung yang dilakukan maka koordinasi dari pihak pemerintah daerah yaitu koordinasi antar Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kota Makassar yang memiliki peran aktif dan dominan terhadap program tersebut. Hasil yang diperoleh diatas menggambarkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak pihak terkait dalam mensukseskan program pemerintah dapat dikatakan sangat baik karena keempat dimensi yang terdapat dalam teori Koordinasi yang dikemukakan oleh Handyadiningrat peneliti nilai sudah maksimal, mulai dari komunikasi dua arah yang dilakukan pihak pihak terkait hingga gambaran kontinuitas perencanaan yang baik dan tetap mengikuti arahan dari pejabat berwenang yang dituangkan dalam bentuk suatu produk hukum.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 19 di Kota Makassar.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Koordinasi Pemerintah Daerah di Kota Makassar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah di Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku dan Jurnal:

- Febrian, R., A., 2015. "Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)". Pekanbaru: WEDANA Vol 1.1
- Nurhidayat, M., dkk, 2013. "Koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar." Makassar: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3.2
- Afendi, S., Masjaya, Burhanuddin. 2019. "Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengendalian Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda". eJournal ilmu Pemerintahan. Vol 7(2)



**2. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Putusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 jo 9/2020 Tentang Gugus Tugas  
Percepatan Penanganan Corona Virus Disese (Covid-19)

